

**ANALISIS PERAN MODERASI ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH
(ZIS) DALAM HUBUNGAN PENGARUH PENDAPATAN ASLI
DAERAH, DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP
TINGKAT KEMISKINAN: STUDI PADA 35 KABUPATEN /
KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2019-2024**

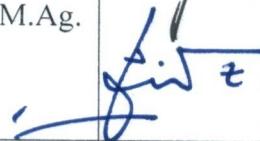


**PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Chusna Shoimmah
Nim : 50423001
Program studi : Magister Ekonomi Syariah
Judul tesis : Analisis Peran Moderasi Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Dalam Hubungan Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan: Studi Pada 35 Kabupaten / Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2024

Tesis ini telah disetujui oleh pembimbing untuk di ajukan ke sidang panitia ujian
Tesis Program Magister

JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN	TANGGAL
Pembimbing 1	Prof. Dr. H.Ade Dedi Rohayana, M.Ag NIP. 197101151998031005		13 Oktober 2025
Pembimbing 2	Dr. AM. Muh. khafidz Ma'shum, M.Ag. NIP. 197806162003121003		11- Oktober 2025

Pekalongan, 21 Agustus 2025

Mengetahui:

a.n Direktur

Ketua Program Studi

Magister Ekonomi Syariah


Dr. Ali Muhtarom, M.H.I
NIP. 198504052019031007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PASCASARJANA

Jalan Kusuma Bangsa Nomor 9 Pekalongan Kode Pos 51141 Telp. (0285) 412575
www.pps.uingusdur.ac.id email: pps@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Tesis dengan Judul “**ANALISIS PERAN MODERASI ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH (ZIS) DALAM HUBUNGAN PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN: STUDI PADA 35 KABUPATEN / KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019-2024**” yang disusun oleh:

Nama : Chusna Shoimmah

NIM : 50423001

Program Studi : Magister Ekonomi Syariah

Telah dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan pada tanggal 29 Oktober 2025.

JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN	TANGGAL
Ketua Sidang	Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M..Ag NIP : 197101151998031005		17/11/25
Sekretaris Sidang	Dr. Ali Muhtarom, M.H.I 198504052019031007		10/11/25
Penguji Utama	Dr. H. Tamamudin, S.E, M.M NIP. 197910302006041018		17/11/25
Penguji Anggota	Dr. Hendri Hermawan Adinugraha, M.S.I. NIP. 198703112019081001		13/11/25



Mengetahui:

Direktur,

Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag
NIP. 19710115 199803 1 005

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, tesis ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister), baik di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Pekalongan, 12 Mei 2025

Yang membuat pernyataan,



Chusna Shoimmah
NIM. 50423001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1998.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ś	s (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ż	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Z	Z	Zet
س	S	S	Es
ش	Sy	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za'	ż	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
م	M	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	ha'	Ha	Ha
ء	hamzah	~	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نَزَلَ = *nazzala*

بِهِنَّ = *bihinna*

III. Vokal Pendek

Fathah (o`_) ditulis a, *kasrah* (o_) ditulis I, dan *dammah* (o_) ditulis u.

IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi I panjang ditulis i, bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda penghubung (~) diatasnya.

Contoh :

1. Fathah + alif ditulis a, seperti فلا *fala*.
2. Kasrah + ya' mati ditulis I seperti تفصيل *tafsil*.
3. Dammah + wawu mati ditulis u, seperti أصول *usul*.

V. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai *الزهيلي* *az-Zuhaili*
2. Fathah + wawu ditulis au *الدوله* *ad-Daulah*

VI. Ta' Marbuthah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap arab yang sudah diserap kedalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikendaki kata aslinya.
2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis h, contoh: *بداية الهدایة* ditulis *bidayah al-hidayah*.

VII. Hamzah

1. Bila terletak diawal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vocal yang mengiringinya, seperti أَنْ ditulis *anna*.
2. Bila terletak diakhir kata, maka ditulis dengan lambing apostrof(,) seperti شيء ditulis *syai,un*.
3. Bila terletak ditengah kata setelah vocal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya, seperti ربائب ditulis *raba'ib*.
4. Bila terletak ditengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambing apostrof (,) seperti تَخْذُونَ ditulis *ta'khuzuna*.

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila ditulis huruf qamariyah ditulis al, seperti البقرة *al-Baqarah*.
2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf 'I' diganti dengan huruf syamsiyah yang bersangkutan, seperti النساء *an-Nisa'*.

IX. Penulisan Kata-kata Sandang dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya, seperti : ذوي الفرود *zawi al-furud* atau أهل السنة *ahlu as-sunnah*.

MOTTO

"Sebagaimana Ibn Khaldun menegaskan bahwa kemakmuran tumbuh dari keadilan yang ditegakkan, maka mengelola sumber daya dengan amanah dan mendistribusikannya secara adil adalah jalan menegakkan kesejahteraan, menghapus kemiskinan, dan meneguhkan peradaban yang berlandaskan nilai-nilai Islam."

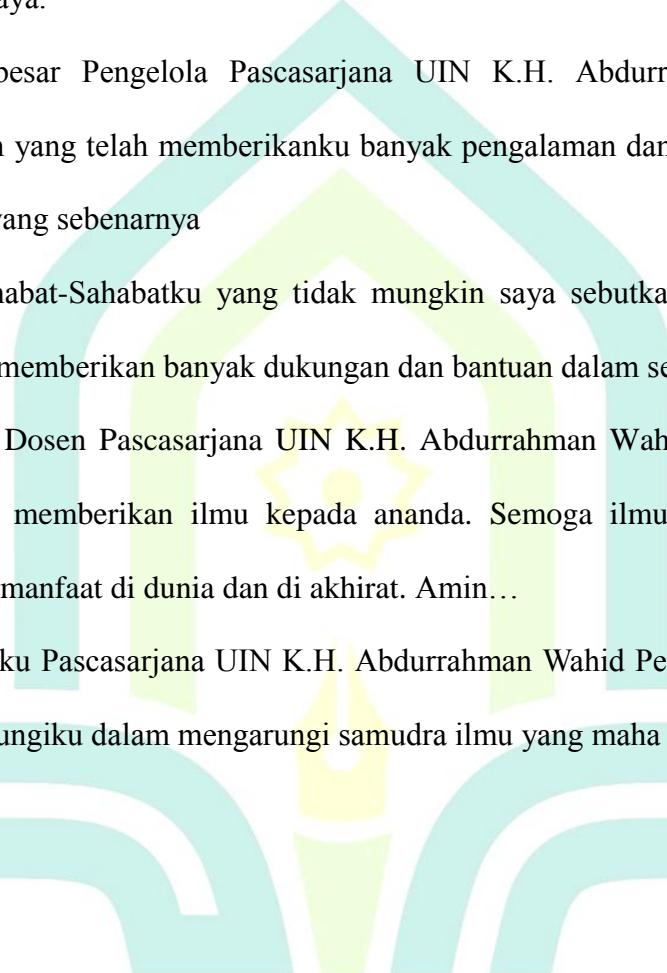
PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa Syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan saya kekuatan dan kesempatan untuk menyelesaikan tugas akhir Tesis ini, meskipun dengan segala keterbatasannya. Saya bersyukur kepada-Mu, ya Allah. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW. Atas petunjuknya kita dibimbing dan diarahkan ke jalan yang benar yaitu agama Islam.

Kehadiran orang-orang istimewa di sekitar saya juga memberikan dukungan moral dan doa. Berkat pertolongan-Mu melalui mereka, saya mampu menuntaskan Tesis ini dengan sebaik-baiknya.

Tesis ini ananda pesembahanan teruntuk :

1. Bapak dan Ibu Drs H. Amin Masruri, M.Pd yang selalu memberikan restu dan kasih sayang, dukungan, baik materi maupun non materi, serta do'a tulus yang tiada henti dan takkan pernah padam sepanjang masa serta telah mengantarkan pada kondisi saat ini, semua itu akan terukir indah dalam relung hati ananda yang paling dalam.

- 
2. Suami (H. Achmad Supriyono) dan anak-anakku (M. Dhiya'ul Fikri dan M. Tsaqiful Mumtaz) tercinta yang selalu memberikan semangat dan dorongan untuk menyelesaikan thesis ini, serta waktu yang tersisih untukku.
 3. Bapak Prof. H. Zaenal mustakim, M.Ag dan Bapak H. Muhtar Ali Ahmadi yang mengijikan dan memberikan kesempatan saya untuk meningkatkan keilmuan saya.
 4. Keluarga besar Pengelola Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikanku banyak pengalaman dan menunjukkan arti hidup yang sebenarnya
 5. Semua Sahabat-Sahabatku yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan banyak dukungan dan bantuan dalam segala hal.
 6. Bapak Ibu Dosen Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu kepada ananda. Semoga ilmu yang engkau berikan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin...
 7. Almamaterku Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah menaungiku dalam mengarungi samudra ilmu yang maha luas

ABSTRAK

Chusna Soimmah, 2025, Analisis Peran Moderasi Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dalam Hubungan Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan: Studi pada 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2024. Tesis, Program Studi Magister Ekonomi Syariah, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: I. Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. II. Dr. AM. Muh. Khafidz Ma'shum, M.Ag

Kata Kunc : Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Zakat Infak Sedekah, Tingkat Kemiskinan, *Moderated Regression Analysis* (MRA)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan, serta menilai peran Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) sebagai variabel moderasi dalam hubungan tersebut di 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2019–2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian explanatory dan memanfaatkan data sekunder tahunan. Populasi penelitian mencakup seluruh 35 Kabupaten/Kota dengan total 210 unit data, yang seluruhnya digunakan sebagai sampel. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan model moderasi (*Moderated Regression Analysis*) menggunakan perangkat lunak EViews 10.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan. ZIS terbukti memoderasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kemiskinan dengan arah positif, sehingga memperlemah efek negatif Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) tidak memoderasi pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan. Temuan ini menekankan pentingnya optimalisasi kebijakan fiskal daerah dan integrasi Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dalam upaya pengentasan kemiskinan secara efektif.

ABSTRACT

Chusna Soimmah, 2025, Analysis of the Moderating Role of Zakat, Infak, and Sedekah (ZIS) in the Relationship Between Local Revenue, Economic Growth, and Poverty Levels: A Study of 35 Districts/Cities in Central Java Province from 2019 to 2024. Thesis, Master's Program in Islamic Economics, Graduate School, State Islamic University K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisors: I. Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. II. Dr. AM. Muh. Khafidz Ma'shum, M.Ag

Keywords: *Local Revenue, Economic Growth, Zakat, Infaq, and Sadaqah, Poverty Rate, Moderated Regression Analysis (MRA)*

This study aims to analyze the effect of Local Own-Source Revenue (PAD) and economic growth on poverty levels, as well as to assess the role of Zakat, Infak, and Sedekah (ZIS) as moderating variables in this relationship in 35 districts/cities in Central Java Province during the period 2019–2024. This study uses a quantitative approach with an explanatory research type and utilizes annual secondary data. The research population covers all 35 regencies/cities with a total of 210 data units, all of which are used as samples. The analysis technique used is panel data regression with a moderation model (Moderated Regression Analysis) using EViews 10 software.

The results show that Local Own-Source Revenue (PAD) has a negative and significant effect on poverty levels, while economic growth has no significant effect. ZIS was proven to moderate the effect of Local Own-Source Revenue (PAD) on poverty in a positive direction, thereby weakening the negative effect of Local Own-Source Revenue (PAD), but Zakat, Infak, and Sedekah (ZIS) did not moderate the effect of economic growth on poverty. These findings emphasize the importance of optimizing regional fiscal policy and integrating Zakat, Infak, and Sedekah (ZIS) in effective poverty alleviation efforts

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: “Analisis Peran Moderasi Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dalam Hubungan Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan: Studi Pada 35 Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2024” Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua memperoleh syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin.

Peneliti menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini Peneliti ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah memberikan kesempatan serta arahan selama pendidikan, penelitian dan Penelitian tesis ini.
3. Dr. Ali Muhtarom M.H.I. selaku ketua Program Ekonomi Syariah

Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
yang telah memberikan kesempatan dan arahan dalam Penelitian tesis ini.

4. Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. selaku pembimbing I dalam Penelitian tesis ini dan dosen yang dengan sabar memberikan bimbingan dan arahan sejak permulaan sampai dengan selesaiya tesis ini.
5. Dr. AM. Muh. Khafidz Ma'shum, M.Ag. selaku pembimbing II dalam Penelitian tesis ini dan juga dosen yang dengan sabar memberikan bimbingan dan arahan sejak permulaan sampai dengan selesaiya tesis ini.

Peneliti menyadari akan segala keterbatasan dan kekurangan dari isi maupun tulisan tesis ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak masih dapat diterima dengan senang hati. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan pembelajaran Agama Islam di masa depan.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 10 Nopember 2025

Chusna Shoimmah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GRAFIK	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. 1 Latar Belakang	1
1. 2 Identifikasi Masalah	19
1. 3 Pembatasan Masalah	20
1. 4 Rumusan Masalah	21
1. 5 Tujuan Penelitian	22
1. 6 Manfaat Penelitian	23
BAB II LANDASAN TEORI	26
2. 1 Diskripsi Teoretik	26
2.1.1 Kemiskinan	26
2.1.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	46
2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi	50
2.1.4 Zakat, Infak, dan Sedekah	58
2. 2 Kajian Hasil Penelitian yang Relevan (Telaah Pustaka)	68
2. 3 Kerangka Berfikir	83
BAB III METODELOGI PENELITIAN	94
3. 1 Pendekatan dan Jenis Penelitian	94
3. 1 Populasi dan Sampel Penelitian	94
3. 3 Variabel Penelitian dan Operasionalisasi Variabel	95
3. 4 Data dan Sumber Data	96
3. 5 Teknik Analisis Data	97
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN	113
4. 1 Gambaran Umum Penelitian	113
4. 2 Perkembangan Variabel Penelitian	113
4.2.1 Tingkat Kemiskinan	113

4.2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	116
4.2.3 Pertumbuhan Ekonomi	118
4.2.4 Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS).....	121
4.3 Statistik Deskriptif Data Penelitian	123
4.4 Pemilihan Model Regresi Data Panel.....	125
4.4.1 Hasil Uji Chow.....	126
4.4.2 Hasil Uji Hausman	128
4.4.3 Hasil Uji Lagrange Multiplier (LM).....	129
4.5 Uji Asumsi Klasik.....	131
4.5.1 Hasil Uji Normalitas.....	132
4.5.2 Hasil Uji Multikolinieritas.....	133
4.5.3 Hasil Uji Autokorelasi	135
4.5.4 Hasil Uji Heteroskestisitas	136
4.6 Hasil Uji Hipotesis	137
4.6.1 Hasil Uji Hipotesis Dasar.....	139
4.6.2 Hasil Uji Hipotesis <i>Moderated Regression Analysis (MRA)</i>	145
4.7 Pembahasan	152
4.7.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Tingkat Kemiskinan	152
4.7.2 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan	155
4.7.3 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Tingkat Kemiskinan dengan Zakat, Infak, dan Sedekah sebagai Variabel Moderasi	158
4.7.4 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan dengan Zakat, Infak, dan Sedekah sebagai Variabel Moderasi	161
BAB V KESIMPULAN	163
5.1 Kesimpulan Hasil Penelitian.....	164
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	166
5.3 Implikasi Hasil Penelitian	167
5.4 Saran	169
DAFTAR PUSTAKA	172
LAMPIRAN-LAMPIRAN	182
Lampiran 1 Data Penelitian sebelum Transformasi ke Logaritma Natural (LN)	182
Lampiran 2 Data setelah Tranformasi ke Logaritma Natural (LN)	192
Lampiran 3 Hasil Output Analisis EViews	192

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Data Rata- Rata Kemiskinan Pada 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2024.....	7
Tabel 1. 2	Data Rata- Rata Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada 35 Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2024	10
Tabel 1. 3	Data Rata- Rata Pertumbuhan Ekonomi Pada 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2024	13
Tabel 1. 4	Data Rata- Rata Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) Pada 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2024	20
Tabel 2. 1	Penyebaran Pengeluaran Penduduk Miskin.....	55
Tabel 2. 1	Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo-Klasik.....	555
Tabel 2. 2	Data Penelitian Terhahulu (Studi Empiris)	79
Tabel 3. 1	Operasionalisasi Variabel	96
Tabel 4. 1	Data Perkembangan Tingkat Kemiskinan Tahun 2019-2024 (Persen)	114
Tabel 4. 2	Data Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2019-2024 (Milyar Rupiah)	117
Tabel 4. 3	Data Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2019-2024 (Persen)	119
Tabel 4. 4	Data Perkembangan 4 Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS)Tahun 2019-2024 (Milyar Rupiah)	122
Tabel 4. 5	Data Statistik Deskriptif Penelitian.....	124
Tabel 4. 6	Hasil Uji Chow	127
Tabel 4. 7	Hasil Uji Hausman	129
Tabel 4. 8	Hasil Pengujian Langrange Multiplier.....	131
Tabel 4. 9	Hasil Uji Multikolinieritas	134
Tabel 4. 10	Hasil Uji Autokorelasi	135
Tabel 4. 11	Hasil Uji Heteroskesdastisitas	136
Tabel 4. 12	Hasil Estimasi Regresi Data Panel Dasar	140
Tabel 4. 13	Hasil Uji T Regresi Panel Dasar	142
Tabel 4. 14	Hasil Koefisien Determinasi Regresi Panel Dasar	144
Tabel 4. 15	Hasil Estimasi Moderated Regression Analysis (MRA).....	146
Tabel 4. 16	Hasil Uji T Regresi Data Panel dengan Moderated Regression Analysis (MRA).....	149
Tabel 4. 17	Hasil Koefisien Determinasi Regresi Panel dengan Moderated Regression Analysis (MRA).....	151

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. 1 Data Perbandingan Tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah dan Tingkat Kemiskinan Nasional Tahun 2019-2024..... 5



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir..... 83

Gambar 4. 1 Hasil Uji Normalitas..... 133



BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Sebagian besar negara di dunia selalu memperhatikan masalah kemiskinan. Ini mencakup berbagai aspek perilaku manusia dan dinamika sosial, yang membuatnya kompleks dan berbagai dimensi (Alam, 2017; Siwar et al., 2014). Secara umum, kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana kebutuhan dasar hidup seseorang tidak terpenuhi secara layak. Dalam kasus ini, kemiskinan tidak hanya mencerminkan ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga keterbatasan terhadap akses terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, perawatan kesehatan, dan partisipasi sosial yang lebih besar.

Kemiskinan merupakan permasalahan mendasar yang perlu ditangani baik pada tingkat global maupun nasional. Hal ini tercermin dari penetapan “*No Poverty*” sebagai tujuan pertama dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*), yang menegaskan bahwa kemiskinan menjadi tantangan utama dalam agenda pembangunan global. Tantangan ini dirasakan hampir oleh seluruh negara, khususnya negara-negara dunia ketiga (Bappenas, 2022).

Kemiskinan dapat dijelaskan melalui *vicious circle of poverty Theory* atau teori lingkaran kemiskinan, yang menggambarkan rangkaian faktor saling terkait yang menyebabkan suatu daerah terus terjebak dalam

kemiskinan dan kesulitan mencapai tingkat pembangunan yang lebih baik. Berbagai faktor yang menyebabkan kemiskinan meliputi ketidakseimbangan antara pendapatan yang diperoleh dan pengeluaran, serta tingkat pengangguran yang tinggi, yang pada gilirannya memperburuk kondisi kemiskinan (Lindrianti, 2024).

Di Indonesia, kesadaran terhadap dampak negatif kemiskinan telah muncul sejak lama. Menurut Purwanto (2007), pemerintah telah menempatkan isu kemiskinan sebagai salah satu fokus utama dalam agenda pembangunan nasional, terutama sejak masa Orde Baru. Hal ini didorong oleh pemahaman bahwa tingginya tingkat kemiskinan dapat menghambat pembangunan, memperluas kesenjangan sosial, serta menurunkan kualitas hidup masyarakat secara agregat. Karena hal tersebut, berbagai program dan kebijakan penanggulangan kemiskinan terus digulirkan dari pemerintah, baik pada tingkat pusat ataupun daerah.

Untuk membuat kebijakan yang tepat sasaran, diperlukan pemahaman menyeluruh tentang cara mengukur kemiskinan. Sebagaimana dijelaskan dalam *Handbook on Poverty and Inequality* dari *world Bank*, pendekatan kebutuhan dasar, atau pendekatan kebutuhan dasar, adalah pendekatan yang umum digunakan untuk mengukur kemiskinan. Metode ini menggambarkan kemiskinan sebagai keadaan apabila seseorang atau rumah tangga tidak dapat mencukupi kebutuhan dasar mereka, baik makanan maupun non-makanan (Jasasila, 2020).

Penilaian terhadap kondisi kemiskinan melalui pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis tingkat pengeluaran rumah tangga. Seseorang atau rumah tangga diklasifikasikan sebagai miskin apabila rata-rata (*average*) pengeluaran setiap individu per bulan lebih rendah dari batas kemiskinan. Garis kemiskinan sendiri didefinisikan sebagai ambang batas pengeluaran minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi standar kesejahteraan dasar, yang mencakup kebutuhan pokok konsumsi seperti makanan, papan, sandang, pendidikan, serta kesehatan (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024a).

Dalam perspektif Islam, kemiskinan bukan hanya sekadar kekurangan materi, melainkan juga mencakup seseorang yang tidak sanggup dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup layak. Islam memandang kemiskinan sebagai kondisi yang harus diatasi secara sistematis melalui mekanisme distribusi kekayaan yang adil, salah satunya melalui zakat (An-Nabhani, 2004). Al-Qur'an secara eksplisit memaparkan terdapat delapan golongan yang memiliki hak menerima zakat (*mustahiq*), dua di antaranya adalah *al-fuqara'* (orang fakir) dan *al-masakin* (orang miskin), sebagaimana firman Allah dalam QS. At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَةُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلَفَةُ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيْضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْمٌ حَكِيمٌ

Arinya, "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan

pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (QS. At-Taubah [9]: 60; Kementerian Agama, 2019d)

Kitab *Al-Hawi al-Kabir* karya Al-Mawardi menyajikan definisi mendalam mengenai kemiskinan, yang menjelaskan bahwa orang miskin adalah individu yang memiliki penghasilan atau harta namun tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan dasar mereka. Sebaliknya, orang fakir adalah individu yang tidak memiliki penghasilan maupun harta sama sekali (Al-Mawardi, 2003). Pembedaan ini penting untuk memahami karakteristik dua kategori utama mustahiq zakat, sekaligus menunjukkan bahwa Islam memiliki konsep yang jelas dan adil dalam menangani persoalan kemiskinan. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan dalam Islam bukan sekadar bantuan, tetapi bagian dari sistem ekonomi yang bertujuan menegakkan keadilan sosial dan menjaga kehormatan *manusia* (*hifzh al-karamah al-insaniyah*).

Kemiskinan masih menjadi persoalan mendasar dalam pembangunan daerah, termasuk pada Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), dengan persentase penduduk miskin di Jawa Tengah tercatat lebih tinggi jika dibandingkan rata-rata nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa Jawa Tengah menghadapi tantangan serius dalam mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi di tingkat lokal. Suatu daerah dapat dikategorikan sebagai wilayah dengan tingkat kemiskinan ekstrem apabila persentase penduduk miskinnya melebihi angka kemiskinan nasional. Dengan demikian, tingginya angka kemiskinan di Jawa Tengah tidak hanya menggambarkan lemahnya daya

beli masyarakat, tetapi juga menandakan perlunya intervensi kebijakan yang lebih terarah dan berkelanjutan. Hal ini menjadi indikator penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun strategi pengentasan kemiskinan yang lebih efektif, berbasis data dan mempertimbangkan karakteristik sosial-ekonomi lokal. Berikut yaitu data perbandingan tingkat kemiskinan pada Provinsi Jawa Tengah dan Indonesia dari tahun 2018-2024 sebagai berikut:

Grafik 1. 1 Data Perbandingan Tingkat kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah Dan Tingkat Kemiskinan Nasional Tahun 2019-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2025 (Data Diolah) (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024b; Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, 2025b)

Berdasarkan data pada Grafik 1.1, tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Jawa Tengah terjadi pada tahun 2020 sebesar 11,63 persen, sedangkan tingkat kemiskinan nasional juga mencapai puncaknya pada tahun yang sama, yaitu sebesar 9,99 persen. Kondisi ini mencerminkan dampak signifikan dari pandemi Covid-19 terhadap perekonomian, terutama dalam hal penurunan pendapatan masyarakat dan peningkatan

angka pengangguran. Sementara itu, tingkat kemiskinan terendah di Jawa Tengah tercatat pada tahun 2024, yaitu sebesar 10,00 persen, dan secara nasional sebesar 8,80 persen. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi ekonomi dan efektivitas program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir, terutama dalam masa pemulihan pasca pandemi.

Provinsi Jawa Tengah terdiri atas 35 kabupaten/kota yang memipunyai karakteristik sosial, ekonomi, dan geografis yang beragam. Tingkat kemiskinan di setiap daerah tersebut menunjukkan variasi yang signifikan, mencerminkan adanya kesenjangan pembangunan antar wilayah. Analisis tingkat kemiskinan per kabupaten/kota menjadi penting untuk mengidentifikasi daerah-daerah yang memerlukan perhatian khusus dalam perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Dengan pemetaan data yang rinci, pemerintah daerah dapat merancang intervensi yang lebih tepat sasaran, baik dari segi program bantuan sosial, penguatan ekonomi lokal, maupun peningkatan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, pemaparan data tingkat kemiskinan di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah menjadi langkah awal dalam memahami distribusi kemiskinan dan menetapkan prioritas pembangunan daerah secara lebih adil dan efektif. Berikut yaitu tabel data rata-rata tingkat kemiskinan di 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah:

Tabel 1. 1 Data Rata- Rata Kemiskinan Pada 35 Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2024

No.	Kabupaten/Kota	Rata-Rata (Persen)
1	Kab. Banjarnegara	15,24
2	Kab. Banyumas	12,80
3	Kab. Batang	8,97
4	Kab. Blora	11,69
5	Kab. Boyolali	9,93
6	Kab. Brebes	16,35
7	Kab. Cilacap	11,91
8	Kab. Demak	12,22
9	Kab. Grobogan	11,99
10	Kab. Jepara	6,81
11	Kab. Karanganyar	9,96
12	Kab. Kebumen	16,78
13	Kab. Kendal	10,09
14	Kab. Klaten	12,10
15	Kab. Kudus	7,25
16	Kab. Magelang	11,12
17	Kab. Pati	9,59
18	Kab. Pekalongan	9,79
19	Kab. Pemalang	15,50
20	Kab. Purbalingga	15,27
21	Kab. Purworejo	11,56
22	Kab. Rembang	14,87
23	Kab. Semarang	7,30
24	Kab. Sragen	13,04
25	Kab. Sukoharjo	7,62
26	Kab. Tegal	7,73
27	Kab. Temanggung	9,47
28	Kab. Wonogiri	10,88
29	Kab. Wonosobo	16,45
30	Kota Magelang	6,99
31	Kota Pekalongan	6,98
32	Kota Salatiga	4,80
33	Kota Semarang	4,23
34	Kota Surakarta	8,79
35	Kota Tegal	7,77

Sumber: *Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, 2025(Data Diolah)*
 (Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, 2025b)

Berdasarkan tabel 1.1 data rata-rata tingkat kemiskinan di 35 kabupaten / kota di Jawa Tengah, daerah dengan tingkat kemiskinan yang

paling tinggi terjadi di Kabupaten Kebumen, yaitu sebesar 16,78 persen. Angka ini mencerminkan masih tingginya beban kemiskinan di wilayah tersebut, yang kemungkinan dipengaruhi oleh rendahnya akses terhadap lapangan kerja produktif, pendidikan, serta infrastruktur ekonomi yang memadai. Sebaliknya, tingkat kemiskinan terendah tercatat di Kota Semarang, yaitu hanya sebesar 4,23 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa Kota Semarang memiliki kondisi sosial-ekonomi yang lebih baik, dengan peluang kerja dan kesejahteraan masyarakat yang relatif lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya. Perbedaan ini menandakan adanya ketimpangan kesejahteraan antar wilayah di Provinsi Jawa Tengah.

Pada dasarnya, konsep otonomi daerah memberikan kepada pemerintah daerah kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus berbagai urusan pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal masing-masing daerah (Juanda & Siregar, 2023). Kewenangan ini mencakup seluruh aspek pemerintahan, kecuali urusan yang secara tegas menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat sebagaimana ditetapkan di Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Ketentuan ini menjadi dasar hukum dalam pembagian kewenangan serta tanggung jawab fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, serta memperkuat prinsip desentralisasi dalam mengelola pemerintahan.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai kebutuhan

masyarakat, termasuk kebutuhan primer, sekunder, serta tersier, sambil mempertahankan prinsip kebermanfaatan masyarakat (Suparmoko, 2016). Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya diukur dari kemampuan daerah dalam mengatur urusan pemerintahan, tetapi juga dari sejauh mana daerah mampu membiayai kebutuhan pembangunannya secara mandiri.

Sejalan dengan itu, menurut Mudrajat (2004), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah alat penting untuk mengukur kapasitas fiskal suatu daerah. Daerah dengan PAD yang tinggi biasanya memiliki tingkat kemandirian fiskal yang tinggi dan sebagai akibatnya, menerima bantuan pemerintah pusat yang lebih sedikit. Ini menunjukkan prinsip keadilan fiskal, yang berarti lebih banyak dana dialokasikan ke daerah dengan kapasitas fiskal rendah untuk meningkatkan pemerataan pembangunan antar wilayah.

Lebih lanjut, menurut Siregar & Prilia (2025), PAD juga memiliki peran strategis dalam menurunkan tingkat kemiskinan di daerah. Peningkatan PAD menunjukkan kemampuan fiskal yang lebih baik, sehingga memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih maksimal dalam melaksanakan program-program pembangunan dan pelayanan publik yang menyasar langsung masyarakat miskin. Program-program tersebut meliputi penyediaan infrastruktur dasar, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Akibatnya, semakin besar PAD yang dimiliki suatu daerah, semakin besar pula kemampuan daerah tersebut untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

secara berkelanjutan. Tabel berikut mengandung data PAD rata-rata pada 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 1. 2 Data Rata- Rata Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada 35 Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2024

No.	Kabupaten/Kota	Rata-Rata (Milyar Rupiah)
1	Kab. Banjarnegara	297,75
2	Kab. Banyumas	798,89
3	Kab. Batang	295,90
4	Kab. Blora	318,03
5	Kab. Boyolali	452,34
6	Kab. Brebes	461,33
7	Kab. Cilacap	700,11
8	Kab. Demak	456,04
9	Kab. Grobogan	384,03
10	Kab. Jepara	435,90
11	Kab. Karanganyar	403,44
12	Kab. Kebumen	433,96
13	Kab. Kendal	464,34
14	Kab. Klaten	317,33
15	Kab. Kudus	426,40
16	Kab. Magelang	402,32
17	Kab. Pati	382,73
18	Kab. Pekalongan	376,81
19	Kab. Pemalang	347,22
20	Kab. Purbalingga	321,48
21	Kab. Purworejo	375,72
22	Kab. Rembang	357,20
23	Kab. Semarang	522,49
24	Kab. Sragen	408,88
25	Kab. Sukoharjo	456,75
26	Kab. Tegal	506,45
27	Kab. Temanggung	320,91
28	Kab. Wonogiri	263,94
29	Kab. Wonosobo	269,82
30	Kota Magelang	290,21
31	Kota Pekalongan	238,28
32	Kota Salatiga	253,87
33	Kota Semarang	2554,51
34	Kota Surakarta	640,81
35	Kota Tegal	331,90

*Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Republik Indonesia, 2025
(Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Republik Indonesia, 2025)*

Berdasarkan tebal 1.2 data rata-rata PAD tahun 2019-2024 pada 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, terdapat ketimpangan kemampuan fiskal antar daerah. Kota Semarang mencatatkan PAD tertinggi yakni sebesar 2.554,51 miliar rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Semarang memiliki kapasitas fiskal yang jauh lebih besar dibandingkan daerah lainnya, yang kemungkinan disebabkan oleh tingginya aktivitas ekonomi, sektor jasa, perdagangan, serta posisi strategis kota tersebut sebagai ibu kota provinsi. Sebaliknya, PAD terendah tercatat di Kota Pekalongan, yaitu hanya sebesar 238,87 miliar rupiah, yang mencerminkan masih terbatasnya potensi dan kapasitas fiskal daerah tersebut. Perbedaan yang cukup mencolok ini menggambarkan ketimpangan potensi PAD antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Pertumbuhan ekonomi merupakan prasyarat utama dalam upaya menurunkan angka kemiskinan. Meskipun bukan satu-satunya faktor penentu, keberadaan pertumbuhan ekonomi memainkan peran penting dalam menciptakan fondasi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan pertumbuhan ekonomi sering dijadikan parameter dalam penilaian keberhasilan pembangunan suatu wilayah, terutama dari sisi peningkatan aktivitas ekonomi (Triwulandari et al., 2023).

Secara konseptual, pertumbuhan ekonomi merujuk pada peningkatan produksi barang serta jasa yang didorong oleh faktor *quantity* dan *quality*. Pertumbuhan ini diharapkan bisa mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks makroekonomi, menurut

Sukirno (2011) menjelaskan bahwa pendapatan nasional riil yang diperolah suatu wilayah merupakan indikator penting untuk mengamati pertumbuhan ekonomi yang terjadi.

Namun demikian, *economic growth* yang tinggi belum tentu efektif dalam menurunkan *poverty rate* jika tidak disertai dengan pemerataan hasil-hasil pembangunan. Indikator makro ekonomi cenderung bersifat agregat dan belum tentu mencerminkan kondisi ekonomi individu di masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan daerah dituntut untuk memberikan dampak yang nyata dan inklusif terhadap pertumbuhan ekonomi regional (Dama et al., 2016).

Lebih lanjut, Todaro (2011) berpendapat bahwa untuk mengatasi keterbelakangan ekonomi, pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi strategi penting dalam meningkatkan pendapatan per kapita dan menciptakan kemakmuran. Dalam konteks ini, pertumbuhan ekonomi digunakan untuk menurunkan tingkat kemiskinan.

Sejalan dengan pendekatan tersebut, teori *Pro-Poor Growth* menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang berpihak pada kelompok miskin. Karena hal itu, manfaat dari pertumbuhannya dapat dirasakan secara inklusif oleh semua elemen dalam masyarakat, khususnya kelompok rentan (Fauziah & Suman, 2024). Menurut Ampomsah et al. (2023), juga menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi memberikan kontribusi nyata dalam menurunkan tingkat kemiskinan suatu daerah. Pandangan ini menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi yang dikelola secara inklusif dan

berkeadilan dapat menjadi instrumen efektif untuk meningkatkan kesejahteraan, terutama bagi masyarakat miskin. Berikut yaitu data rata-rata pertumbuhan ekonomi pada 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah:

Tabel 1. 3 Data Rata- Rata Pertumbuhan Ekonomi pada 35 Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2024

No.	Kabupaten/Kota	Rata-Rata (Persen)
1	Kab. Banjarnegara	3,82
2	Kab. Banyumas	4,20
3	Kab. Batang	4,42
4	Kab. Blora	2,00
5	Kab. Boyolali	4,40
6	Kab. Brebes	3,71
7	Kab. Cilacap	1,21
8	Kab. Demak	3,85
9	Kab. Grobogan	3,99
10	Kab. Jepara	4,01
11	Kab. Karanganyar	4,07
12	Kab. Kebumen	4,00
13	Kab. Kendal	4,13
14	Kab. Klaten	4,14
15	Kab. Kudus	0,94
16	Kab. Magelang	3,78
17	Kab. Pati	3,96
18	Kab. Pekalongan	3,71
19	Kab. Pemalang	3,97
20	Kab. Purbalingga	3,69
21	Kab. Purworejo	3,73
22	Kab. Rembang	3,90
23	Kab. Semarang	3,63
24	Kab. Sragen	3,93
25	Kab. Sukoharjo	3,95
26	Kab. Tegal	3,82
27	Kab. Temanggung	3,58
28	Kab. Wonogiri	3,77

No.	Kabupaten/Kota	Rata-Rata (Persen)
29	Kab. Wonosobo	3,58
30	Kota Magelang	3,82
31	Kota Pekalongan	3,96
32	Kota Salatiga	3,97
33	Kota Semarang	4,54
34	Kota Surakarta	4,24
35	Kota Tegal	3,67

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, 2025(Data Diolah) (Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, 2025)

Berdasarkan Tabel 1.3, data rata-rata pertumbuhan ekonomi di 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 menunjukkan bahwa Kota Semarang memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi dengan angka rata-rata sebesar 4,54 persen. Capaian ini menggambarkan kinerja ekonomi yang relatif stabil dan kuat sebagai pusat aktivitas ekonomi dan perdagangan di Jawa Tengah. Sementara itu, rata-rata pertumbuhan ekonomi terendah tercatat di Kabupaten Kudus, yaitu hanya sebesar 0,94 persen. Angka ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kudus mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan dibandingkan daerah lainnya, yang mungkin disebabkan oleh faktor-faktor struktural, terbatasnya investasi, atau dampak jangka panjang pandemi terhadap sektor unggulan di wilayah tersebut.

Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) merupakan unsur penting dalam syariat Islam yang mempunyai potensi besar dalam upaya pengentasan kemiskinan serta menciptakan keadilan sosial. Dana ZIS, apabila dihimpun

dan disalurkan secara tepat, dapat menjadi sumber pemberdayaan efektif bagi masyarakat miskin, baik sebagai modal usaha maupun sebagai dukungan untuk mempertahankan keberlangsungan usaha kecil (Amani, 2022). Selain sebagai sistem distribusi kekayaan, ZIS juga berfungsi sebagai instrumen yang mendorong penguatan ekonomi masyarakat.

Islam menaruh perhatian besar terhadap kesejahteraan kelompok rentan. Oleh karena itu, pemanfaatan dana ZIS tidak terbatas pada kebutuhan konsumtif, tetapi juga diarahkan pada kegiatan produktif seperti pembangunan infrastruktur dasar, pemberdayaan pendidikan, layanan kesehatan, dan program sosial lainnya (Norvadewi, 2012). Secara definisi, zakat menjadi kewajiban untuk setiap Muslim yang telah memenuhi syarat, berupa pengeluaran sebagian harta terhadap golongan yang memiliki hak (mustahik) sesuai ketentuan syariat. Sedangkan, infak dan sedekah bersifat sukarela, dengan cakupan yang lebih luas; infak tidak dibatasi oleh nisab maupun jumlah tertentu, sedangkan sedekah dapat berupa harta maupun non-materi (Murobbi & Usman, 2021).

Berbagai penelitian empiris menunjukkan bahwa zakat memiliki peran signifikan dalam menurunkan angka kemiskinan. Zakat bekerja sebagai alat redistribusi yang terukur, membantu mengurangi kesenjangan sosial, mendorong ekonomi kerakyatan, dan berkontribusi pada pendanaan kesejahteraan masyarakat di luar anggaran pemerintah (Irawan, 2020). Di sisi lain, infak dan sedekah meskipun memiliki korelasi negatif terhadap kemiskinan, pengaruhnya secara statistik cenderung tidak signifikan yang

menunjukkan bahwa efektivitas zakat lebih tinggi karena memiliki mekanisme penyaluran yang sistematis (Sari & Firdayetti, 2019).

Selain memberikan bantuan finansial, zakat dan sedekah juga berperan dalam memperluas akses masyarakat miskin terhadap pendidikan dan kesehatan, serta memperkuat solidaritas sosial. Namun, keberhasilan ZIS dalam pengentasan kemiskinan sangat bergantung pada tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, ZIS dapat menjadi instrumen sosial-ekonomi yang efektif dalam membangun masyarakat yang adil, peduli, dan berdaya, jika dikelola dengan baik dan didukung oleh kesadaran kolektif umat (Irawan, 2020; Kholid, 2020). Data rata-rata ZIS pada 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah disajikan dalam tabel :

**Tabel 1. 4 Data Rata- Rata Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS)
Pada 35 Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2024**

No.	Kabupaten/Kota	Rata-Rata (Miliar Rupiah)
1	Kab. Banjarnegara	7,67
2	Kab. Banyumas	16,26
3	Kab. Batang	2,58
4	Kab. Blora	7,94
5	Kab. Boyolali	7,99
6	Kab. Brebes	5,28
7	Kab. Cilacap	14,45
8	Kab. Demak	7,05
9	Kab. Grobogan	5,31
10	Kab. Jepara	6,06
11	Kab. Karanganyar	15,99
12	Kab. Kebumen	8,42
13	Kab. Kendal	10,44
14	Kab. Klaten	5,70
15	Kab. Kudus	4,22
16	Kab. Magelang	5,33
17	Kab. Pati	8,30

No.	Kabupaten/Kota	Rata-Rata (Milyar Rupiah)
18	Kab. Pekalongan	3,70
19	Kab. Pemalang	8,24
20	Kab. Purbalingga	5,03
21	Kab. Purworejo	5,20
22	Kab. Rembang	3,61
23	Kab. Semarang	11,67
24	Kab. Sragen	10,95
25	Kab. Sukoharjo	5,09
26	Kab. Tegal	4,96
27	Kab. Temanggung	8,38
28	Kab. Wonogiri	0,68
29	Kab. Wonosobo	3,16
30	Kota Magelang	4,27
31	Kota Pekalongan	16,51
32	Kota Salatiga	1,76
33	Kota Semarang	12,61
34	Kota Surakarta	3,89
35	Kota Tegal	2,05

Sumber: *Badan Amil Zakat Nasional, 2025(Data Diolah)* (Badan Amil Zakat Nasional, 2025)

Berdasarkan Tabel 1.4, data rata-rata penerimaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode tahun 2019 hingga 2024 menunjukkan bahwa Kota Pekalongan mencatatkan rata-rata penerimaan ZIS tertinggi, yaitu sebesar 16,51 miliar rupiah. Angka ini mencerminkan tingginya partisipasi masyarakat dalam filantropi Islam di wilayah tersebut, serta efektivitas pengelolaan dan penghimpunan dana ZIS oleh lembaga yang berwenang. Sebaliknya, rata-rata penerimaan ZIS terendah tercatat di Kabupaten Wonogiri, dengan nilai hanya sebesar 0,68 miliar rupiah. Hal ini mengindikasikan bahwa potensi penghimpunan dana ZIS di Kabupaten Wonogiri masih sangat rendah, yang kemungkinan dipengaruhi oleh tingkat kesejahteraan masyarakat,

kesadaran berzakat, atau kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan ZIS yang belum optimal.

Berdasarkan uraian sebelumnya, beberapa indikator ekonomi daerah, khususnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan, masih menunjukkan kesenjangan antara target dan realisasi. Meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan, kemiskinan di sejumlah wilayah tetap tinggi dan sulit ditekan secara signifikan. Hal ini menandakan urgensi untuk menggali lebih dalam mengenai determinan yang berkontribusi terhadap kemiskinan di wilayah daerah.

Salah satu indikator penting yang menjadi perhatian adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena mencerminkan kapasitas fiskal dan kemandirian ekonomi suatu daerah. PAD diyakini berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan melalui optimalisasi belanja daerah. Di sisi lain, ZIS diposisikan sebagai variabel *moderating* yang berpotensi memperkuat atau memperlemah pengaruh PAD serta pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, penulis terdorong untuk mengangkat penelitian dengan judul: “Analisis Peran Moderasi Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dalam Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan: Studi pada 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.”

1. 2. Identifikasi Masalah

Fokus dalam penelitian ini adalah pada analisis pengaruh PAD dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan, dengan mempertimbangkan peran moderasi ZIS di 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019 sampai dengan 2024. Pendekatan ini dilakukan untuk menggali lebih dalam bagaimana instrumen fiskal daerah dan pertumbuhan ekonomi dapat memengaruhi pengurangan kemiskinan, serta sejauh mana ZIS berperan dalam memperkuat atau memperlemah pengaruh tersebut. Beberapa permasalahan utama yang diidentifikasi dalam penelitian ini meliputi:

1. Berdasarkan rata-rata Tingkat Kemiskinan pada 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2024, diketahui bahwa angka tersebut berada di atas rata-rata angka nasional. Temuan ini mengindikasikan bahwa Provinsi Jawa Tengah masih menghadapi permasalahan kemiskinan yang cukup serius, bahkan cenderung mengarah pada kategori kemiskinan ekstrem.
2. PAD berbeda-beda antar daerah, meskipun terjadi peningkatan PAD, tidak selalu diiringi dengan penurunan angka kemiskinan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pemanfaatan PAD dalam mengatasi kemiskinan.
3. Pertumbuhan Ekonomi di berbagai kabupaten/kota tidak merata, dan dalam beberapa kasus tidak diikuti dengan penurunan tingkat

kemiskinan secara signifikan, sehingga menimbulkan dugaan adanya kesenjangan distribusi hasil pertumbuhan.

4. ZIS sebagai alat kebijakan ekonomi syariah telah tumbuh dan dikelola oleh berbagai BAZNAS dan LAZ, namun perannya dalam memoderasi terhadap hubungan antara PAD dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan belum banyak diteliti secara empiris dalam konteks daerah.
5. Belum terdapat banyak penelitian yang secara khusus menguji peran ZIS sebagai variabel *moderating* dalam hubungan antara PAD dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan, khususnya dalam ruang lingkup 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

1. 3 Pembatasan Masalah

Fokus dari pembatasan masalah untuk memberikan fokus yang jelas terhadap variabel-variabel yang dianalisis serta menetapkan lingkup penelitian agar hasil yang diperoleh lebih terarah dan mendalam. Ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada hal-hal berikut:

1. Fokus dalam penelitian ini yaitu pada 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah sebagai unit analisis, tanpa membahas wilayah provinsi lain di Indonesia.
2. Data yang diterapakan dalam penelitian ini merupakan data tahunan selama periode 2019-2024, bersumber dari DJPK, BPS, dan BAZNAS.

3. Fokus variabel pada penelitian ini adalah Tingkat Kemiskinan sebagai variabel bebas, PAD dan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel terikat, dan Zakat, ZIS sebagai variabel moderasi.
4. Penelitian ini tidak mencakup pembahasan terhadap variabel lain yang berpotensi memengaruhi tingkat kemiskinan, seperti tingkat pendidikan, tingkat pengangguran, maupun kualitas infrastruktur.
5. Data ZIS dalam penelitian ini merujuk pada total penghimpunan dari masing-masing kabupaten/kota, tanpa melakukan pemisahan antara komponen zakat, infak, dan sedekah secara individual.
6. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis interaksi *moderated regression analysis*, tanpa menggunakan pendekatan kualitatif atau studi kasus mendalam.

1. 4 Rumusan Masalah

Tingkat kemiskinan yang tinggi di beberapa daerah di Jawa Tengah menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan PAD dan pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya berhasil. ZIS sebagai instrumen ekonomi syariah memiliki potensi strategis untuk mendukung pengentasan kemiskinan. Namun, belum banyak penelitian empiris tentang peran moderasi ZIS terhadap pengaruh PAD dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan. Karena hal itu, pertanyaan penelitian berikut dibuat:

1. Apakah ada pengaruh PAD terhadap Tingkat Kemiskinan di 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2024?.

2. Apakah ada pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2024?.
3. Apakah ZIS dapat memoderasi pengaruh PAD terhadap Tingkat Kemiskinan di 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2024?.
4. Apakah ZIS dapat memoderasi pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2024?.

1. 5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini menyelidiki korelasi dari PAD dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah selama tahun 2019-2024. Selain itu, ZIS memainkan peran moderasi dalam hubungan ini. Tujuan dari pendekatan ini yaitu untuk memperoleh pemahaman yang luas mengenai bagaimana kebijakan fiskal, pertumbuhan ekonomi, dan filantropi Islam bekerja sama untuk mengatasi kemiskinan di tingkat daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh PAD terhadap Tingkat Kemiskinan pada 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019-2024.
2. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan pada 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019-2024.

3. Untuk menganalisis peran ZIS dalam memoderasi pengaruh PAD terhadap Tingkat Kemiskinan pada 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019-2024.
4. Untuk menganalisis peran ZIS dalam memoderasi pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan pada 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019-2024.

1. 6 Manfaat Penelitian

Harapan dari penelitian ini dapat memperkaya pemahaman secara teoritis sekaligus memberikan solusi praktis terkait penanggulangan kemiskinan berdasarkan pendekatan ekonomi dan filantropi Islam. Secara lebih rinci, manfaat penelitian ini meliputi:

1. Manfaat Teoretis

Dari sisi teori, studi ini bertujuan memberikan kontribusi penting dalam memperkaya literatur ekonomi, terutama dalam konteks penanggulangan kemiskinan secara multidimensi. Penelitian ini mengintegrasikan variabel-variabel ekonomi konvensional, seperti PAD dan pertumbuhan ekonomi, dengan instrumen keuangan sosial Islam berupa ZIS, sehingga memberikan kontribusi sebagai berikut:

- a. Ekonomi Publik, melalui analisis mengenai bagaimana PAD sebagai instrumen fiskal dapat berperan dalam menurunkan tingkat kemiskinan.

- b. Ekonomi Pembangunan, dengan mengevaluasi keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dan dinamika kemiskinan diwilayah regional.
- c. Ekonomi Islam, melalui pemanfaatan ZIS sebagai variabel *moderating* yang merepresentasikan instrumen filantropi Islam dalam memperkuat efektivitas kebijakan ekonomi daerah terhadap pengurangan kemiskinan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini mempunyai manfaat praktis ditujukan untuk memberi kontribusi yang penting kepada berbagai pihak terkait sebagai bagian dari usaha pengentasan kemiskinan pada Provinsi Jawa Tengah. Secara khusus, manfaat tersebut mencakup:

- a. Bagi Pemerintah Daerah, temuan pada studi ini diharapkan dijadikan acuan dalam perumusan kebijakan fiskal serta pembangunan ekonomi yang lebih terarah dan efektif, dengan memperhatikan peran strategis ZIS sebagai instrumen sosial-ekonomi berbasis syariah yang berpotensi mendukung pengurangan kemiskinan secara signifikan.
- b. Bagi lembaga pengelola zakat, seperti LAZ BAZNAS, dari hasil penelitian ini dapat memberi wawasan baru mengenai pentingnya integrasi program-program ZIS dalam mendukung efektivitas pembangunan daerah dan upaya penurunan angka kemiskinan secara berkelanjutan.

- c. Bagi Akademisi dan Peneliti, studi ini dapat dijadikan sebagai referensi ilmiah yang valid untuk pengembangan studi lanjutan yang mengkaji keterkaitan antara variabel fiskal, makroekonomi, dan keuangan sosial Islam dalam konteks pembangunan kesejahteraan masyarakat secara komprehensif.



BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan Hasil Penelitian

Kesimpulan merupakan rangkuman dari temuan-temuan utama dalam penelitian ini yang diperoleh melalui analisis data dan pengujian hipotesis. Berdasarkan hasil estimasi regresi panel dan pendekatan *Moderated Regression Analysis* (MRA), penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan, serta peran moderasi dari variabel Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2019-2024.

Kesimpulan disusun secara sistematis untuk menjawab keempat rumusan hipotesis yang telah dirancang dalam kerangka pemikiran teoritis dan telah diuji secara empiris menggunakan metode yang sesuai. Kesimpulan dari penelitian ini disajikan berdasarkan hasil analisis kuantitatif dan interpretasi ekonomi, baik dari perspektif konvensional maupun ekonomi Islam. Kesimpulan pada hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai *p-value* sebesar 0,0000 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 5%, serta koefisien sebesar -1,638498 yang menunjukkan arah hubungan negatif. Dengan demikian, PAD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Artinya, peningkatan PAD mampu menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan.

2. Variabel pertumbuhan ekonomi memiliki nilai *p-value* sebesar 0,1532 yang lebih besar dari tingkat signifikansi 5%, serta koefisien sebesar -0,005911 yang menunjukkan arah hubungan negatif. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Meskipun arah koefisien negatif, pengaruhnya tidak cukup kuat secara statistik.
3. Variabel interaksi antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Zakat, Infak, serta Sedekah (ZIS) memiliki nilai *p-value* sebesar 0,0000 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 5%, serta koefisien sebesar 0,159998 yang menunjukkan arah hubungan positif. Dengan demikian, ZIS memoderasi secara signifikan hubungan antara PAD dan tingkat kemiskinan. Arah koefisien positif mengindikasikan bahwa peningkatan ZIS justru cenderung melemahkan pengaruh negatif PAD terhadap kemiskinan, sehingga peran moderasinya bersifat antagonistik.
4. Variabel interaksi antara pertumbuhan ekonomi dan ZIS menunjukkan nilai *p-value* sebesar 0,5352, lebih besar dari tingkat signifikansi 5%. Koefisien interaksi sebesar 0,001208 menunjukkan arah hubungan positif. Dengan demikian, ZIS tidak berperan signifikan sebagai variabel moderasi terhadap hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan. Arah koefisien positif menunjukkan bahwa ZIS cenderung melemahkan pengaruh negatif pertumbuhan ekonomi terhadap pengurangan kemiskinan.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Dalam suatu penelitian ilmiah, keterbatasan merupakan hal yang wajar dan perlu diungkapkan secara jujur untuk memberikan gambaran mengenai ruang lingkup, validitas, dan generalisasi dari hasil temuan. Keterbatasan ini juga menjadi landasan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penyempurnaan atau pengembangan studi di masa mendatang. Penelitian ini, terdapat beberapa keterbatasan sebagai berikut:

1. Data Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) yang digunakan dalam penelitian ini hanya mencakup data yang dilaporkan oleh BAZNAS kabupaten/kota dan provinsi di Jawa Tengah selama periode 2019-2024. Data dari lembaga amil zakat non-pemerintah (LAZ) yang juga aktif dalam pendistribusian ZIS belum dapat dimasukkan karena keterbatasan akses dan konsistensi pelaporan. Hal ini berpotensi menyebabkan nilai ZIS yang dianalisis belum sepenuhnya merepresentasikan realitas yang ada.
2. Penelitian ini menggunakan regresi panel statis dengan pendekatan efek acak (*Random Effect Model*) serta pendekatan *Moderated Regression Analysis* (MRA). Model tersebut belum mempertimbangkan kemungkinan adanya dinamika waktu atau endogenitas dalam variabel, sehingga hasilnya terbatas pada hubungan statis antar variabel. Model dinamis atau *Generalized Method of Moments* (GMM) seperti *System GMM atau First Difference GMM* belum digunakan, padahal model tersebut lebih cocok untuk menangkap dinamika panel jangka panjang dan memperbaiki kemungkinan bias simultanitas.

3. Interaksi antara variabel independen dengan ZIS sebagai variabel moderasi diasumsikan bersifat linear. Dalam kenyataannya, hubungan antara variabel ekonomi dan kemiskinan dapat bersifat non-linear atau asimetris. Model non-linear seperti *Panel Smooth Transition Regression* (PSTR) atau pendekatan Panel Bayesian yang mampu menangkap dinamika kompleks antar variabel belum digunakan dalam penelitian ini.
4. Penelitian ini hanya menggunakan PAD, Pertumbuhan Ekonomi, dan ZIS sebagai variabel utama, tanpa memasukkan faktor-faktor lain yang juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan seperti pengangguran, pendidikan, atau indeks pembangunan manusia (IPM). Ketiadaan variabel kontrol ini berpotensi menyebabkan variabel *omitted variable* bias dalam hasil estimasi.

5.3 Implikasi Hasil Penelitian

Setiap penelitian ilmiah tidak hanya bertujuan untuk memberikan kontribusi teoritis, tetapi juga diharapkan mampu menghasilkan implikasi kebijakan dan praktis yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak terkait. Implikasi hasil penelitian ini bertumpu pada temuan empiris yang menunjukkan bagaimana Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pertumbuhan Ekonomi, dan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) memengaruhi tingkat kemiskinan di 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2019-2024, baik secara langsung maupun melalui interaksi moderasi. Adapun implikasi dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbukti efektif dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan pengelolaan dan alokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara tepat sasaran. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebaiknya difokuskan untuk membiayai sektor-sektor yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat miskin, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan program pemberdayaan ekonomi. Optimalisasi ini akan meningkatkan efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.
2. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum sepenuhnya berdampak signifikan pada pengurangan kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa manfaat pertumbuhan belum merata dan belum inklusif. Pemerintah daerah perlu menitikberatkan pada pembangunan sektor riil, industri padat karya, dan usaha mikro, kecil, dan menengah, sehingga kelompok masyarakat miskin dapat memperoleh akses terhadap lapangan kerja dan pendapatan yang lebih baik. Strategi ini akan meningkatkan kontribusi pertumbuhan ekonomi terhadap pengentasan kemiskinan.
3. Dana Zakat, Infak, dan Sedekah berperan sebagai variabel moderasi dalam hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan kemiskinan, namun arah pengaruhnya bersifat melemahkan. Hal ini menekankan perlunya integrasi dan koordinasi yang lebih baik antara pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dan program Zakat, Infak, dan Sedekah. Pemerintah daerah bersama lembaga pengelola zakat perlu meningkatkan efektivitas pendataan

penerima manfaat, penyaluran dana secara produktif, dan penyusunan program yang terintegrasi dengan kebijakan pembangunan daerah.

4. Dana Zakat, Infak, dan Sedekah belum mampu memperkuat pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengurangan kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas dana sosial Islam dalam mendukung inklusivitas pertumbuhan ekonomi masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan inovasi program Zakat, Infak, dan Sedekah yang selaras dengan strategi pembangunan ekonomi, termasuk pemberdayaan kelompok rentan dalam kegiatan ekonomi produktif dan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.

5.4 Saran

Berdasarkan hasil temuan empiris dan keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, beberapa saran perlu disampaikan sebagai masukan strategis bagi para pengambil kebijakan, praktisi, lembaga pengelola zakat, serta peneliti selanjutnya. Saran-saran ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan efektivitas program penanggulangan kemiskinan, memperkuat sinergi antara instrumen keuangan publik dan keuangan sosial Islam, serta mendorong penyempurnaan pendekatan metodologis dalam penelitian sejenis di masa mendatang. Adapun saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk program-program penanggulangan kemiskinan yang

lebih tepat sasaran, seperti pendidikan gratis berkualitas, bantuan kesehatan untuk keluarga miskin, serta pemberdayaan ekonomi berbasis UMKM. Fokus kebijakan harus diarahkan pada peningkatan kualitas belanja, bukan hanya besarnya anggaran.

2. Mengingat Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) terbukti memiliki peran moderasi yang signifikan terhadap hubungan antara PAD dan tingkat kemiskinan, pemerintah daerah perlu membangun sinergi yang lebih kuat antara APBD dan instrumen keuangan sosial Islam. Kebijakan kolaboratif bersama BAZNAS dapat diarahkan pada perencanaan pembangunan dan penganggaran program sosial, termasuk pengintegrasian data mustahik dan fakir miskin secara digital untuk meningkatkan ketepatan sasaran dan efektivitas program penanggulangan kemiskinan.
3. Perlu dilakukan inovasi dan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan dana ZIS, sehingga distribusinya lebih produktif dan berkelanjutan. Penyaluran zakat yang selama ini bersifat konsumtif sebaiknya diarahkan secara bertahap ke bentuk zakat produktif, seperti pembiayaan usaha mikro berbasis syariah, pelatihan keterampilan kerja, serta program pemberdayaan mustahik berbasis komunitas.

Penelitian ini menggunakan metode regresi panel statis dengan pendekatan efek acak dan *Moderated Regression Analysis* (MRA). Oleh karena itu, untuk memperdalam pemahaman dan ketepatan model, peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan panel dinamis atau *Generalized Method of Moments* (GMM), seperti *System GMM* (SYS-GMM), *First Difference GMM*

(FD-GMM), dan *Panel Smooth Transition Regression* (Panel STR). Selain itu, pendekatan *Bayesian Panel Data Regression* juga dapat digunakan untuk memberikan estimasi parameter yang lebih robust dalam kondisi sampel terbatas atau adanya heterogenitas tidak terobservasi secara kuat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdulrahman, R. R., Salih, A. M., Hama, H., Hussein, S., Aivas, S. A., Ahamd, K. H., Fatah, N. A., Karem, L. E., Yaqub, K. Q., & Bayz, A. (2025). The Role of Agriculture Sector in Eradicating Poverty : Challenges , Policies , and Pathways for Economic Growth in Less Developed Countries. *International Journal of Social Science and Education Research Studies*, 05(02), 208–213.
- Achmad, Y. (2024). *Peran dan Manfaat Zakat, Infak, Sedekah untuk Sosial Ekonomi*. Dompet Dhuafa. <https://dompetdhuafajateng.org/peran-dan-manfaat-zakat-infak-sedekah-untuk-sosial-ekonomi/>
- Al-Mawardi, I. H. (2003). *Al-Hawi Al-Kabir*. Dar al Fikr. https://opac.uinfasbengkulu.ac.id/index.php?p=show_detail&id=1700&keywords=
- Al-Syathibi, A. I. I. bin M. al-L. al-G. al-M. (2005). *Al-Muwafaqat fi Ushul as-Syariah*. Kementerian Agama. https://perpustakaanlajnah.kemenag.go.id/home/index.php?p=show_detail&id=5458&keywords=
- Alam, K. (2017). Poverty reduction through enabling factors. *World Journal of Science, Technology and Sustainable Development*, 14(4), 310–321. <https://doi.org/10.1108/WJSTSD-07-2016-0049>
- Aliem, M. (2022). Analisis Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Sulawesi Selatan. In *Universitas Hasanuddin* (Vol. 33, Issue 1). Universitas Hasanuddin.
- Amponsah, M., Agbola, F. W., & Mahmood, A. (2023). The relationship between poverty, income inequality and inclusive growth in Sub-Saharan Africa. *Economic Modelling*, 126, 106415. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2023.106415>
- An-Nabhani, T. (2004). *An-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam* (Cetakan VI). Darul Ummah. <https://pustaka.iiq.ac.id/detailview.php?id=5>
- Apriyanti, M., & Rospida, L. (2025). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Gini, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap kemiskinan Indonesia tahun 2014-2023. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)* Vol. 8 No. 2, 2025 *PENGARUH*, 8(2), 439–455.
- Arizaq, A. B. (2024). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Bantuan Sosial, Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Kemiskinan Dengan Pendistribusian Dana Zakat Sebagai Variabel Moderasi Di Jawa*

- Tengah Tahun 2018-2023. UIN salagita.*
- Asutay, M. (2013). Islamic moral economy as the foundation of Islamic finance. In *Islamic Finance in Europe*. Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781781002513.00014>
- Badan Amil Zakat Nasional. (2025). *Data Zakat, Infak, dan Sedekah Seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia*. BAZNAS Indoensia. <https://baznas.go.id/statistik-zakat-nasional>
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2023). Profil Kemiskinan Di Indonesia September 2023. *Berita Resmi Statistik*, 1(5), 8.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2024a). *Profil Kemiskinan di Indonesia September 2024*. 50.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2024b). *Data Presentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi Tahun 2018-2023*. Badan Pusat Statistik Indonesia. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTkyIzI=/persentase-penduduk-miskin--maret-2023.html>
- Badan Pusat Statistik Jawa Tengah. (2025a). *Data Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa tengah Tahun 2019-2023*. Badan Pusat Statistik Jawa Tengah. <https://jateng.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTc0MyMy/-seri-2010-laju-pertumbuhan-pdrb-atas-dasar-harga-konstan-2010-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-tengah.html>
- Badan Pusat Statistik Jawa Tengah. (2025b). *Data Presentase Penduduk Miskin Di Provinsi Jawa Tengah Dan Tingkat Kemiskinan Tahun 2019-2023*. Badan Pusat Statistik Jawa Tengah. <https://jateng.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzQjMg==/kemiskinan.html>
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2023). Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023. *Badan Pusat Statistik*, 47, 1–16. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/1483/persentase-penduduk-miskin-maret-2018-turun-menjadi-9-82-persen.html>
- Baltagi, B. H. (2005). Econometric Analysis of Panel Data. In *Xenobiotica* (Vol. 5, Issue 7). <https://doi.org/10.3109/00498257509056115>
- Bappenas. (2022). Sustainable Transport, Sustainable Development. In *Sustainable Transport, Sustainable Development*. <https://doi.org/10.18356/9789210010788>
- Baron, R. M., & Kenny, D. A. (1986). The Moderator-Mediator Variable Distinction in Social Psychological Research: Conceptual, Strategic, and

- Statistical Considerations. *European Journal of Women's Studies*, 25(3), 310–324. <https://doi.org/10.1177/1350506818764762>
- Bentham, J. (1789). An introduction to the principles of morals and legislation (excerpt). *Problemos*, 83, 188–190. <https://doi.org/10.15388/problemos.2013.0.822>
- Boediono. (1999). *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. BPFE. <https://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=20379757>
- Cannan, E., & Pigou, A. C. (1932). The Economics of Welfare. *The Economic Journal*, 31(122), 206. <https://doi.org/10.2307/2222816>
- Chapra, U. (2000). *Islam Dan Pembangunan Ekonomi* (I. Abidin Basri (ed.)). Gema Insani Press.
- Dama, H. Y., Lapihan, A. L. C., & Sumual, J. I. (2016). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kota Manado (Tahun 2005-2014). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(3), 549–561.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Republik Indonesia. (2025). *Data APBD Seluruh Kabupaten/Kota di Indoensia*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412>
- Fauziah, N., & Suman, A. (2024). Determinan Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Pulau Jawa (Perspektif Teori Pro-Poor Growth & Human Capital). *Journal Of Development Economic And Social Studies*, 3(4), 1009–1014.
- Fitriyanti, N. I., & Handayani, H. R. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Belanja Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016). *Diponegoro Journal of Economics*, 9(2), 79–90. <https://doi.org/10.14710/DJOE.31536>
- Gai, A. M., Sir, M. M., Paru, M. A., & Aryunto, P. (2025). *The Influence Of Economic Growth, Human Development Index, And Open Unemployment Rate On Poverty Levels In Sumenep Regency*. 8(2), 1–23.
- Ghozali, I., & Ratmono, D. (2017). *Analisis multivariat dan ekonometrika : Teori, konsep dan aplikasi dengan eviews 10*. Badan Penerbit Undip. <https://lib.uajy.ac.id/welcome/buku/0000058585>
- Gobin, R. E., Headley, B., Mulfels, R., & Dirven, H. J. (2003). *The Real Worlds of Welfare Capitalism* (Edisi ke 3). Cambridge University Press. <https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=HgCherX6phMC&oi=fnd&>

pg=PR5&dq=E.+Robert+Goodin,+The+Real+Worlds+of+Welfare+Capitalism&ots=fm-GGWFhHC&sig=qmhSDrvfT2D-DFa_Af5B9CzVxSE&redir_esc=y#v=onepage&q=E. Robert Goodin%2C The Real Worlds of Welfare Capitalism

Gujarati, D. N., & Porter., D. C. (2015). *Dasar-dasar Ekonometrika (Buku 1)*. Salemba Empat. http://libstie.latansamashiro.ac.id//index.php?p=show_detail&id=1186

Hafidha, S. I. (2024). *Penyebab kemiskinan : pahami definisi dan dampak yang ditimbulkan*. Liputan6.Com. <https://www.liputan6.com/hot/read/5307518/6-penyebab-kemiskinan-pahami-definisi-dan-dampak-yang-ditimbulkan>

Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam perekonomian modern*. Ghema Insani Press. <https://books.google.co.id/books?id=a6o2sAU07XkC&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q&f=false>

Hermawati, I., Diyanayati, K., Hikmawati, E., Andari, S., Winarno, E., Cahyono, S. A. T., Hardiati, E., Udiati, T. U., Yulani, D., Dr., T. M., Widiowati, D., Suradi, Pairan, & Molasy, H. D. (2015). Pengkajian Konsep Dan Indikator kemiskinan. In *Nhk 技研* (Vol. 151). B2P3KS Press.

Huda, N., & Dkk. (2015). *Ekonomi Pembangunan Islam* (Cetakan Pe). Kencana. <https://books.google.co.id/books?id=hcSZDwAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false>

Ifaturrahmi. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan Dengan Pengangguran Sebagai Variabel Moderasi Di Provinsi Nusa Tenggara Barat. In *UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: Vol. VIII* (Issue I). UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Imana, N. (2019). Implementasi Maqashid Syari'ah Sebagai Model Kebijakan Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Kota Malang Periode 2011-2016. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5 (2), 208-219. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Anis+Ni'am+Imana%2C+“Implementasi+Maqashid+Syari'ah+Sebagai+Model+Kebijakan+Kesejahteraan+Masyarakat+Pemerintah+Kota+Malang+Periode+2011-+2016”%2C+Al-Intaj+5%2C+no.2+%282019%29%3A+210.&btnG=

Imsar, I., Sitompul, F. A., & Nasution, J. (2023). Pengaruh Dana Zakat, Pembiayaan Syariah, Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) Terhadap Tingkat Kemiskinan Dengan Indeks Pembangunan Manusia Sebagai Variabel Intervening. *OIKONOMIKA: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 4(1), 1–13. <https://doi.org/10.53491/oikonomika.v4i1.557>

- Irawan, F. (2020). Peran Filantropi Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, 7(2), 105–117. <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v7i2.215>
- Jasasila. (2020). Pengaruh Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Batang Hari 2011 -2019. *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 40. <https://doi.org/10.33087/eksis.v11i1.192>
- Jhingan, M. . (2014). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Rajawali Pers.
- Juanda, R., & Siregar, M. K. (2023). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Utara Pada Tahun 2017 - 2021. *Jurnal Ekonomika Indonesia*, 12(1), 19. <https://doi.org/10.29103/ekonomika.v12i1.12210>
- Kakwani, N., & Pernia, E. M. (2000). What is Pro-poor Growth? *Asian Development Review*, 18(01), 1–16. <https://doi.org/10.1142/S0116110500000014>
- Karimah, A. (2024). Pengaruh dana zakat, infak, sedekah (zis) terhadap arus inflasi di kalsel periode 2021-2023. *Journal Islamic Education*, 3(Vol. 3 No.Vol 3 No. 2 (2024): April: Journal Islamic Education), 206–217.
- Kementerian Agama. (2019a). *Q.S. Al-Ma'un: 1-7*. Kementerian Agama.
- Kementerian Agama. (2019b). *Q.S. An-Nisa' Ayat 9*. Kementerian Agama.
- Kementerian Agama. (2019c). *Qs. Al-A'raaf Ayat 96*. Kementerian Agama.
- Kementerian Agama. (2019d). *QS. At-Taubah ayat 60*. Kementerian Agama.
- Kementerian Agama. (2019e). *Qs Nuh Ayat 10-12*. Kementerian Agama.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*.
- Kholid, A. N. (2020). Dampak Zakat, Infak Dan Sedekah (Zis) Terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan Dan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Bina Ummat: Membina Dan Membentengi Ummat*, 2(01), 65–105. <https://doi.org/10.38214/jurnalbinaummatstdnatsir.v2i01.40>
- Krishnan, R. (2014). Introduction to Poverty Analysis. *World Bank Manual*, April,

2014.

- Lestari, P., & Fitriyati, D. (2011). *Pengaruh Belanja Pemerintah, Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Kediri*. 1–16.
- Lincoln, A. (2009). *Ekonomi Pembangunan* (Edisi Ke 5). STIM YKPN. https://books.google.co.id/books/about/Ekonomi_Pembangunan_Edisi_5.htm?id=ktLtzwEACAAJ&redir_esc=y
- Lindrianti, N. F. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Alokasi Dana Dari Pusat Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Di Yogyakarta Tahun 2015-2020. *Diponegoro Journal of Economics*, 11(1), 46–56. <https://doi.org/10.14710/djoe.32822>
- Mankiw, N. G. (2006). *Makroekonomi* (Edisi Ke 6). Erlangga. <https://books.google.co.id/books?id=RcXYdVdz1UAC&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>
- Mawardi, bu H. A. B. M. bin H. Al. (2005). *Al Ahkam Al Sulthaniyah Wa al wilayat Al diniyah* (Edisi Keti). Dar al Kutub al Ilmiyah. https://ukt.uinsa.ac.id/index.php?p=show_detail&id=15553
- Miftahussalam, M., & Rofiuddin, M. (2021). Pengaruh PDRB, indeks pembagunan manusia dan zakat terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 1(1), 40–54. <https://doi.org/10.53088/jerps.v1i1.63>
- Mudrajat, K. (2004). *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*. UPP AMP YKPN.
- Murobbi, M. N., & Usman, H. (2021). Pengaruh Zakat, Infak Sedekah, dan Inflasi Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 4(2), 846–857. <https://doi.org/10.36778/jesya.v4i2.390>
- Musgrave, R. A. (1959). *The Theory of Public Finance: A Study in Public Economy*. McGraw-Hill. https://books.google.co.id/books?id=GQMdAAAAIAAJ&hl=id&source=gbs_book_other_versions_r&cad=3
- Nabila, Z., Balqis, P., & Nurhadi, B. (2025). Dampak jumlah penduduk , upah minimum dan indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan : Peran ZIS sebagai variabel moderasi di Jawa Tengah. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 5(1), 61–72.
- Nizar, F., & Arif, M. (2023). Pengaruh Rata Lama Sekolah, Pengeluaran

- Perkapita, Pendapatan Asli Daerah, Investasi, Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Nusa Tenggara Barat Tahun 2012-2021. *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 4(1), 48–58. <https://doi.org/10.15575/jim.v4i1.23599>
- Norvadewi. (2012). Optimalisasi Peran Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia. *Mazahib*, 10(1), 66–76.
- Purwanti, D. (2020). Pengaruh Zakat, Infak, dan Sedekah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(1), 101. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i1.896>
- Purwanto, E. A. (2007). Mengkaji Potensi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk pembuatan Kebijakan Anti Kemiskinan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 10(3), 295–324.
- Rahmawati Muin. (2020). *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Cetakan Pe). Pusaka Almaida. https://repository.uin-alauddin.ac.id/17187/1/buku_Rahmawati_compressed.pdf
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Pub. L. No. 11, 1 (2009). <https://www.youtube.com/watch?v=Y0pjP3o7dY>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, 53 Pemerintah Republik Indonesia 167 (2011).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, 1 Republik Indonesia 1 (2014).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Republik Indonesia (2019). <https://doi.org/10.1093/oed/9600622025>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, 3 Bakti Hayati: Jurnal Pengabdian Indonesia 8 (2022). <https://doi.org/10.31957/bhjpi.v3i1.3855>
- Ridlo, M., & Muthohar, A. M. (2020). Pengaruh Zakat, Pembiayaan Syariah Dan APBN Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia Dan Malaysia. *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 17(2), 123–130. <https://doi.org/10.34001/jdeb.v17i2.1101>
- Rizki, N., Darma, S., & Amri, K. (2024). *Pengaruh Zakat dan Dana Otonomi Khusus Terhadap Kemiskinan dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi*. 3(1), 37–44.

- Robert L. Payton and Michael P. Moody. (2008). *Payton Moody Understanding Philanthropy.pdf*.
- Romdhoni, A. H. (2017). Zakat Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan. *Al-'Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 3(1), 23–35. <https://doi.org/10.31538/adlh.v3i1.403>
- Rukmana, S. H., & Imaningsih, N. (2023). Pengaruh Tingkat Pengangguran, Pendapatan Asli Daerah, dan Rata Rata Lama Sekolah terhadap Tingkat Kemiskinan Tahun 2002-2021. *Kaganga:Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, 6(2), 826–833. <https://doi.org/10.31539/kaganga.v6i2.7342>
- Santoso, S. (2010). *Statistik Parametrik: Konsep dan Aplikasi Dengan SPSS*. Elex Media Komputindo. <https://books.google.co.id/books?id=fVNbamuPVugC&printsec=copyright#v=onepage&q&f=false>
- Saprel, Pratama, N., & Vanelia, I. S. (2024). Pengaruh Penyaluran Dana Zakat, Infaq, Sedekah dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Kerinci. *Jurnal Development*, 9(2), 169–180.
- Sari, E. R., & Firdayetti. (2019). Analisis Pengaruh Zakat, Infak, Sedekah Dan Usyr (Pajak Impor) Terhadap Kemiskinan Di Indonesia. *Media Ekonomi*, 26(1), 39–46. <https://doi.org/10.25105/me.v26i1.5161>
- Sartono. (2023). *Analisis Determinan Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Batang Hari*. <https://repository.unja.ac.id/50817/>
- Saryana. (2020). Analisis Kebijakan Penanggulangan kemiskinan di Indonesia. In *Disertasi*. Universitas Islam Indonesia.
- Seebohm, R. B. (1901). *Poverty: A Study Of Orban Life*. MacMillan Press. <https://wellcomecollection.org/works/cv2ekdg7>
- Septianingsih, R., & Agustin, H. (2016). Pengaruh Zakat Terhadap Pengurangan Kemiskinan. *Jurnal Islamika*, 6(1), 1–23.
- Sharp, J., Routledge, P., Philo, C., & Paddison, R. (2000). *Power Entanglement: Geography of Domination/Resistance* (ilustrasi). Psikologi PerS.
- Siahaan, M. P. (2010). *Pajak Daerah & Retribusi Daerah* (Revisi Cet). Rajawali Pers. <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=294>
- Silk, T. (1999). *Filantropi dan Hukum di Asia: Tantangan untuk Indonesia*. Consortium.

- https://perpustakaan.komnasham.go.id/opackomnas/index.php?p=show_detail&id=13161&keywords=
- Siregar, W., & Prilia, F. I. (2025). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Daerah dan Kemiskinan pada Pertumbuhan Ekonomi di Gorontalo*. 3.
- Siswantoro, A., & Gandhi, E. A. (2025). Dinamika Pertumbuhan Ekonomi , Kepadatan Penduduk , dan Peran Sektor Pertanian dalam Mengentaskan Kemiskinan. *Ecoplan*, 8(1), 1–15.
- Situmorang, S. H., & Lufti, M. (2014). *Analisis Data: Untuk Riset Manajemen dan Bisnis* (Edisi keti). USU Press. https://opaclib.inaba.ac.id/index.php?p=show_detail&id=3984&keywords=
- Siwar, C., Ahmed, F., Mohd Idris, N. D., Idrus, S., Abdul Ghan, A. H., & Zahari, S. Z. (2014). Poverty Mapping and Assessing Socio-Demographic Characteristics of the Households: A Case Study in Pahang, Malaysia. *Journal of Applied Sciences*, 14(20), 2632–2640. <https://doi.org/10.3923/jas.2014.2632.2640>
- Sriyana, J. (2025). Poverty Alleviation in the Local Economy To Achieve Sustainable Development Goals. *Journal of Lifestyle and SDG'S Review*, 5(2), 1–16. <https://doi.org/10.47172/2965-730X.SDGsReview.v5.n02.pe03942>
- Subagyo, A. (2013). *Kamus Istilah Ekonomi Islam*. Elex Media Komputindo. https://books.google.co.id/books/about/Kamus_Istilah_Ekonomi_Islam.html?id=HYUAcgAACAAJ&redir_esc=y
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*.
- Sukirno, S. (2016). *Makroekonomi Teori Pengantar*. Rajawali Pers. <https://elibrary.bsi.ac.id/readbook/201062/makroekonomi-teori-pengantar>
- Suparmoko, M. (2016). *keuangan Negara Dalam Teori dan Praktik* (Edisi 6). BPFE. https://elibrary.unsap.ac.id/index.php?p=show_detail&id=2870
- Suryawati. (2004). *Teori Ekonomi Mikro*. AMP YKPN. https://opac.umi.ac.id/index.php?p=show_detail&id=1553&keywords=
- Susanti, N. (2024). Zakat dan Kebijakan Fisikal Perspektif Ekonomi Islam: Tinjauan Kepustakaan. *Social Science Academic*, 2(1), 209–212. <https://doi.org/10.37680/ssa.v2i1.6108>
- Tambunan, T. (2001). *Perekonomian Indonesia: Teori dan Temuan Empiris*. Ghalia Indonesia. https://books.google.co.id/books/about/Perekonomian_

Indonesia.html?hl=id&id=teLsAAAAMAAJ&redir_esc=y

Tarida, A. K., & Nurhadi, B. (2024). Pengaruh IPM Dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan Dengan ZIS Sebagai Variabel Moderating Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Sosial (EMBISS)*, 4, 511–522.

Todaro, M. (2011). *Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga*. Erlangga.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2014). *Economic Development*. Pearson Education. <https://books.google.co.id/books?id=8yS1oQEACAAJ>

Triwibowo, D., & Bahagijo, S. (2006). *Mimpi negara kesejahteraan: peran negara dalam produksi dan alokasi kesejahteraan sosial*. Darmawan Triwibowo, Sugeng Bahagijo. https://books.google.co.id/books/about/Mimpi_negara_kesejahteraan.html?id=w0oFGQAACAAJ&redir_esc=y

Triwulandari, B. B., Boedirochminarni, A., & Firmansyah, M. (2023). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2013-2022. *JSHP : Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 7(2), 175–187. <https://doi.org/10.32487/jshp.v7i2.1747>

United Nations Development Programme. (2022). *Global Multidimensional Poverty Index (MPI)*. United Nations Development Programme (UNDP). https://hdr-undp-org.translate.goog/content/2022-global-multidimensional-poverty-index-mpi?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc

Yuliany, N. (2022). *Analisis Kemiskinan Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Di Indonesia*. Universitas Hasanuddin.

Zastrow, C. (2009). *Introduction to Social Work and Social Welfare : Empowering People* (Edisi ke 9). Belmont : Brooks/Cole Cengage Learning. <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=2868>